

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau dan kawasan wilayah pantai yang panjangnya mencapai 80.000 km atau dua kali keliling bumi dan khatulistiwa (Bambang Triatmodjo dalam Bastian et al., 2018). Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki kawasan pantai dan potensi perikanan yang signifikan berkat garis pantai yang membentang mengelilingi setengah wilayahnya. Sebagian besar masyarakat pesisir Kabupaten Tanah Bumbu memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan hampir sepenuhnya kegiatan dilakukan disekitar pantai. Kegiatan manusia disekitar pantai dapat mengakibatkan pengikisan tanah dan penurunan garis pantai. Peristiwa abrasi dan akresi dapat disebabkan oleh faktor utama yakni sedimentasi air laut, pasang surut air laut, gelombang laut, arus, aktivitas manusia sekitar pantai dan penggunaan lahan disekitar kawasan pantai (Ismiyanti & Buchori, 2021).

Fenomena perubahan garis pantai perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat dampak yang ditimbulkan begitu besar bagi kehidupan sosial dan lingkungan. Abrasi pantai yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan umum dan bangunan lainnya (Suwarsono et al., 2011). Semenanjung pantai di Kecamatan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan pusat perekonomian dan kawasan padat penduduk. Melihat letak geografis dari semenanjung pantai kawasan tersebut berada tepat berhadapan langsung dengan laut jawa. Hal ini dapat sewaktu-waktu kawasan pantai dihantam oleh gelombang besar dan arus ketika musim angin barat yang terjadi pada wilayah ini.

Abrasi yang terjadi di pesisir pantai pagatan berdampak terhadap ekologi di sekitar kawasan pantai seperti halnya kemunduran garis pantai dan sedimentasi pada daerah hilir sungai. Pada Tahun 2022 telah terjadi gelombang tinggi yang menghantam pantai pagatan. Gelombang tinggi yang menghantam pantai pagatan pada bulan Desember Tahun 2022 mencapai tinggi 6m menurut data dari BMKG Tahun 2022 yang merusak pemukiman warga dan area pemakaman, sehingga warga harus memindahkan area pemakaman yang terdampak. Gelombang tersebut juga salah satu penyebab abrasi yang terjadi di pantai pagatan dan menjadi ancaman tersendiri bagi kerusakan infrastruktur umum di area pantai tersebut. Menurut data dari BMKG Gelombang pada wilayah pantai pagatan umumnya dapat mencapai 2,5-4m. Upaya perlindungan terhadap infrastruktur yang berada disekitar pantai pagatan

diperlukan adanya usaha pencegahan dan pemeliharaan dari pemerintah daerah dengan melakukan mitigasi bencana.

Mitigasi bencana perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi beberapa peristiwa yang disebabkan oleh abrasi pada daerah semenanjung pantai Kecamatan Pagatan. Pembangunan bangunan pelindung pantai seperti bangunan pemecah gelombang, groyne, tanggul laut (*seawall*), tanggul laut (*revetment*) atau lereng beton, jetty, atau juga bisa dengan mengadakan penanaman mangrove sebagai vegetasi pemecah ombak dapat menjadi salah satu opsi untuk mitigasi bencana pada kawasan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merencanakan pembangunan bangunan pelindung pantai berupa *revetment* yang dibuat dari tumpukan batuan pecah dengan tinggi bangunan 4.486 m dan lebar puncak 1.667 m.

Pembuatan tanggul laut (*revetment*) memangkas dana APBD yang tinggi dan memerlukan pengawasan khusus dalam proses pembuatannya untuk mencapai kesesuaian spesifikasi pembangunan. Hal ini diperlukan adanya pengawasan dari Komisi Kejaksaan RI dengan penunjukan Jaksa Tata Usaha Negara sebagai pengawas dan pendampingan hukum selama kegiatan pembangunan oleh negara berlangsung. Pentingnya pengawasan oleh Jaksa Tata Usaha Negara dalam pengerjaan bangunan oleh pemerintah ialah sebagai pencegah penyimpangan anggaran, penjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan menjaga akuntabilitas pemerintah dalam memanfaatkan anggaran, serta memastikan kesesuaian proyek pemerintah dengan spesifikasi yang sudah tertera dalam perjanjian kontrak kerja. Dengan adanya pengawasan oleh Jaksa Tata Usaha Negara pembangunan bangunan tanggul laut (*revetment*) diharapkan dapat berjalan sesuai dengan standar dan spesifikasi bangunan memadai dalam jangka panjang. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi pengawasan pembangunan proyek tanggul laut (*revetment*) oleh Jaksa Tata Usaha Negara di Pantai Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan implementasi kesesuaian spesifikasi proyek pembangunan tanggul laut sesuai dengan SNI 8460:2017 dan Perpres No.70 Tahun 2012 di Pantai Pagatan?
2. Bagaimana analisis kesesuaian spesifikasi proyek pembangunan bangunan tanggul laut di Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan SNI 8460:2017 dan Perpres No.70 Tahun 2012?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini difokuskan pada kegiatan pengawasan Jaksa Tata Usaha Negara dalam kegiatan pendampingan hukum dan pengawasan kesesuaian spesifikasi pembangunan bangunan tanggul laut (*revetment*) di Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pelaksanaan implementasi spesifikasi proyek pembangunan tanggul laut sesuai dengan SNI 8460:2017 dan Perpres No.70 Tahun 2012 di Pantai Pagatan.
2. Menganalisis kesesuaian spesifikasi proyek pembangunan bangunan tanggul laut di Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan SNI 8460:2017 dan Perpres No.70 Tahun 2012.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian berjudul “Analisis Kesesuaian Spesifikasi Proyek Pembangunan Tanggul Laut Dengan Peraturan Yang Berlaku : Studi Kasus Di Wilayah Pantai Pagatan” adalah untuk memberikan informasi terkait proses pelaksanaan kesesuaian spesifikasi proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Pagatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna selanjutnya terhadap bidang hukum kelautan Indonesia, dan Ekologi Laut.